

Resensi

Menjadikan Kesejahteraan Sebagai Isu Inti Demokrasi

Rizki Setiawan

Jurusan Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa,
Banten

Email: rizset@gmail.com

Paskarina Caroline, Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung (Ed). 2015. *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov. 402. halaman.

Indonesia menerapkan paham demokrasi yang baru pasca reformasi; Indonesia tak lagi segan secara terus terang mengkomparasikan dan kemudian mengadopsi demokrasi dari berbagai negara. Melalui sistem yang demokratis diharapkan keseluruhan proses bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa berjalan secara dinamis dan warga dapat memperjuangkan segala hak dengan terbuka sejalan dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang diamandemen, isi maupun periode waktu kekuasaan dibatasi, dan sistem pemerintahan dirubah agar warga senantiasa berdaulat. Singkatnya, melalui kontrol langsung warga terhadap jalannya pemerintahan pada demokrasi dibebankan serangkaian asa; penghormatan HAM, peningkatan kesejahteraan / menurunnya kesenjangan ekonomi, dan lainnya.

Sistem demokrasi menempatkan warga sebagai subjek yang otonom dan partisipatif. Dimana dalam sistem perwakilan dilangsungkan dengan cara menitipkan kepentingan warga secara temporer melalui wakilnya dalam partai politik. Namun

begitu berjalannya demokrasi di Indonesia belum selaras dengan keadilan ekonomi dan keadilan sosial, demokrasi tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan warga. Ketidakmerataan kesejahteraan justru semakin meningkat pasca reformasi, yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks gini / koefisien gini pasca reformasi. Indeks Gini Indonesia masa orde baru tidak pernah melebihi dari 0,37. Sementara kesenjangan ekonomi era demokrasi terus meningkat, dan bahkan pada 2015 telah mencapai angka 0,43.

Warga telah melimpahkan kewenangan yang besar pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menghadirkan kesejahteraan. Tapi kesejahteraan tak kunjung terealisasi karena politik senantiasa minus gagasan dan lebih didominasi retorika dogmatis dan jargon dalam rangka membentuk citra politik; etika sebagai “wakil rakyat” semakin menipis, birokrasi terlampaui kaku, institusi politik formal didominasi elite, maupun tidak seiringnya perjalanan antara aktor dengan sistem demokrasi. Padahal gerak politik seharusnya bersandar pada gagasan mutakhir guna menjawab masalah aktual, dan sistem demokrasi harus senantiasa diperbaharui. Akibatnya, ruang aspirasi kontemporer yang kontekstual secara sosiologis semakin sempit.

Buku berjudul *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal* ini menghadirkan gambaran dan hasil analisis mengenai praktik kontekstual upaya mewujudkan kesejahteraan sebagai isu politik dalam demokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal dan merangkainya ke tingkat nasional. Seluruh bahasan dalam buku ini didukung dengan basis data yang kuat dan aktual yang bersumber dari Survei Baseline Demokrasi (SBD) yang dilakukan pada Februari-Agustus 2013 di 28 kabupaten/kota serta 2 daerah istimewa yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Survei yang melibatkan 592 orang informan lokal dan 32 orang informan nasional ini merupakan bagian dari proyek *Power, Welfare and Democracy* (PWD), proyek kerjasama berbasis penelitian antara Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Oslo (UiO) yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Buku ini merupakan salah satu

keluaran proyek PWD berupa publikasi.

Sejalan dengan keterkaitannya dengan penelitian berbasis SBD, buku ini juga merupakan kelanjutan dari publikasi buku hasil penelitian masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia di tahun 2003 dan 2007 yang bertajuk *Demokrasi di Atas Pasir - Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2009. Penelitian di tahun 2003 menghasilkan temuan terjadinya dominasi oligarki pada praktik demokrasi awal pasca reformasi dimana demokrasi tidak benar-benar merepresentasikan keseluruhan lapisan masyarakat; representasi semu yang tidak mewakili minoritas, dan aktor-aktor pro-demokrasi yang terfragmentasi dan termarginalkan dari agenda demokratisasi. Dari situ kemudian direkomendasikan bagi para aktor pro-demokrasi untuk berperan langsung dalam dinamika kontestasi politik formal guna meningkatkan representasi populer. Sementara penelitian di tahun 2007 menghasilkan temuan bahwa demokrasi berlangsung dengan model konsolidasi demokrasi top down yang didominasi elit. Kinerja institusi politik, tata pemerintahan, dan komunitas politik demokratis membaik namun tidak diiringi dengan mapannya pondasi demokrasi. Sebagian besar hak-hak politik dan kebebasan yang sebelumnya berkembang justru mengalami kemandegan dan bahkan kemunduran. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan bagi organisasi masyarakat sipil maupun warga secara luas untuk membentuk Blok Politik Demokratik (BPD) yang didasarkan atas kepentingan yang disepakati bersama ditingkat lokal maupun pusat.

Sementara dalam hasil penelitian di tahun 2013 yang dipublikasikan melalui buku *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal* ini konsep, kelebihan dan kekurangan demokrasi tidak lagi menjadi pusat. Kajian demokrasi dalam buku ini juga tak sebatas demokrasi elektoral, dimana demokrasi sekedar dipandang sebagai metode kontestasi politik formal untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik secara terbuka dan adil. Buku ini menyajikan hasil evaluasi tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia; mengenai bagaimana dinamika institusi demokrasi, aktor demokrasi, relasi

aktor dan institusi demokrasi, persoalan isu publik, dan kapasitas serta strategi aktor dalam mengaitkan antara gerakan yang dijalani dengan isu publik. Pandangan utama buku ini menggunakan pemikiran Beetham (1999) dalam mendefinisikan demokrasi, dimana demokrasi dilihat sebagai kontrol populer terhadap isu publik dan politik berbasis persamaan hak warga negara. Dengan begitu buku ini melihat bahwa kesejahteraan tidak otomatis hadir dengan perbaikan-perbaikan institusi politik dan birokrasi formal. Dinamika demokrasi haruslah ditinjau melalui praktik kontekstual bagaimana aktor dan institusi politik mengambil kebijakan, menjalankan program politik, dan merefleksikan kepentingan umum dengan menjadikan kesejahteraan sebagai isu politik. Selain itu juga bagaimana warga dapat menjadi subjek yang paham dan memiliki kepedulian terhadap isu publik serta memiliki privilese berupa kontrol atas masalah politik, hukum, dan ekonomi dalam perjalanan demokrasi.

Institusi demokrasi yang berkaitan dengan masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia kontemporer semakin stabil. Ruang partisipasi publik yang terbuka selain menjadi sarana masyarakat dalam menyalurkan kepentingannya juga memunculkan aktor alternatif dengan gagasan inovatif dalam mengelola kesejahteraan. Sistem pemilihan langsung juga memperkuat relasi antara pemilih maupun institusi representasi dengan aktor politik yang berhasil mendapatkan posisi politik. Namun begitu, kondisi menguatnya legitimasi politisi ini ternyata justru membuat aksi aktor politik cenderung hanya merepresentasikan pendukungnya dan mengesampingkan aturan legal formal maupun kalangan lain yang bukan merupakan pendukungnya.

Buku ini terdiri dari 3 bagian yang ditutup dengan refleksi dan rekomendasi. Bagian pertama menyajikan relasi antara isu kesejahteraan dengan politik figur. Didalamnya termuat patronase dan populisme politik di Bandung, populisme dan depolitisasi politik di Jakarta, pemimpin populis di Surabaya, paradoks demokrasi populis di Poso pascakonflik, dan praktik inklusifitas jaminan kesehatan di Aceh.

Bagian kedua membahas strategi eksklusi dan inklusi

kepentingan dalam praktik politik identitas. Pada bagian ini bisa ditemui bagaimana keterlibatan politik warga etnis tionghoa di kabupaten Belu, praktik politik tradisional dan nilai etnisitas di Ternate, peran organisasi masyarakat sipil (OMS) di Banda Aceh, kesejahteraan dan jaminan kebebasan beragama di Bekasi, dan dinamika diskriminasi maupun resistensi kelompok minoritas agama / keyakinan di Sidoarjo.

Bagian ketiga membahas tentang strategi aktor alternatif merebut kontrol atas kesejahteraan. Didalamnya dibahas mengenai dinamika peran aktor dalam demokratisasi di kota Ambon, strategi aktor pro demokrasi dalam memaknai demokrasi di Banjarmasin, pandangan warga Kupang mengenai persoalan publik, simbolisasi kekuasaan dan pertentangan kelompok masyarakat sipil di Lampung Selatan, dan tantangan institusionalisasi demokrasi di Yogyakarta.

Pada bagian penutup berupa refleksi dan rekomendasi disebutkan bahwa untuk memahami perjalanan demokratisasi diperlukan pemahaman mengenai masalah yang terjadi dan solusi yang tersedia serta bagaimana para aktor dapat memanfaatkan kapasitas politik guna menjalankan strategi yang dijalankan sesuai dengan pilihan yang tersedia untuk mengatasinya. Rekomendasi yang diambil masih sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu dengan BPD. Yang baru adalah rekomendasi bagi BPD untuk juga membangun platform kesejahteraan sebagai common platform dan agenda bersama. Dengan begitu BPD dirubah menjadi “Blok Politik Kesejahteraan” (BPK). BPK diusulkan terbagi dalam 3 kelompok; kelompok pengawal penyusunan kebijakan, kelompok massa penekan dengan aksi massa, dan kelompok lobi di parlemen dan partai-partai politik dengan mengangkat isu-isu kesejahteraan berbasis kelompok-kelompok konstituen.

Kuatnya basis data membuat buku ini bisa memberikan gambaran akurat mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik demokrasi di tingkat lokal baik kontestasi antar aktor maupun relasi aktor dengan birokrasi dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga. Selain itu, pembaca juga bisa memperoleh data yang lebih detil mengenai proses demokratisasi

kekinian di Indonesia dengan mengunduh laporan hasil penelitian yang disediakan secara gratis di website PWD sebagai sumber data untuk khalayak umum yang terbuka.

Keterlibatan langsung penulis dalam penelitian SBD dan latar belakang penulis yang merupakan akademisi baik dosen dan peneliti dari universitas, peneliti institusi penelitian, dan aktivis organisasi masyarakat sipil. Penulis terlibat secara langsung dalam demokratisasi sehingga memahami betul bagaimana perjalanan demokrasi yang membuat sudut pandang buku ini cukup holistik. Integrasi antara teoritis dengan praktisi demokrasi dan berbasis penelitian membuat buku ini dapat memberikan detil gambaran masalah kesejahteraan dan kontestasi isu politik kesejahteraan yang spesifik beserta dengan pengalaman dan keterampilan aktor pro demokrasi sehingga bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun strategi riil dalam mempercepat kehadiran kesejahteraan.